

Judul : RUU PRT Sangat Mendesak Disahkan
Tanggal : Kamis, 05 September 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

RUU PRT Sangat Mendesak Disahkan

JELANG berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, masih banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mendesak disahkan. Salah satunya RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT). Apalagi banyak PRT yang jadi korban kekerasan dan diskriminasi akibat ketidakjelasan status pekerjaannya.

Ketua Komisi Perempuan Andy Yentriyani menuturkan pihaknya telah menerima 2.000 laporan mengenai kasus kekerasan dan ketidakadilan yang dialami para PRT sepanjang lima tahun belakangan. Laporan itu dilakukan langsung maupun melalui jaringan yang tersedia.

Beberapa laporan menyebutkan terjadi kekerasan, yakni kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayarkan hingga keterlambatan pembayaran gaji. Ada juga yang melaporkan jam kerja panjang dan tidak manusiawi.

"Tapi yang paling menyakitkan juga marak terjadi. Misalnya, mereka sudah beres-beres rumah sebelum Lebaran. Tapi, waktu mereka bekerja lebih panjang," ujar Andy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sebab itu, diharapkan pengesahan RUU PRT bisa segera dilakukan untuk melindungi kenyamanan dan juga keamanan bagi para PRT di Tanah Air.

"PRT berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan agar semua orang yang berada dalam ekosistem kerja itu bisa merasa aman dan nyaman," katanya.

Lebih lanjut Andy mengungkapkan bahwa jumlah PRT di Indonesia mencapai 60 juta. Angka tersebut dihitung dari sepertiga orang menengah ke atas yang ada di Indonesia hingga 2024. Artinya, perlindungan untuk pekerja di bidang wajib dilakukan. "Bayangkan, orang menengah atas di Indonesia mencapai 189 juta orang, itu tahun 2024. Jika dihitung sepertiga dari orang menengah ke atas, Indonesia memiliki 1 orang PRT, artinya ada 60 juta PRT, terangnya.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan, DPR harus mengambil langkah tegas mengesahkan RUU PRT.

"Sebagai warisan berharga bagi masyarakat sebelum berakhir masa periode saat ini," ujarnya.

Menurut Maman, dengan disahkan RUU PRT dapat memberikan manfaat atas jaminan sosial kepada para PRT yang saat ini tidak terus benar, baik dari upah hingga jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

"Karena di dalamnya terdapat berbagai perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Kita tahu saat ini PRT bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas dan juga upah seadanya," katanya.

Tidak hanya memberikan manfaat jaminan sosial yang jelas bagi para pekerja rumah tangga, RUU PRT ini juga dapat memberikan rasa aman kepada para PRT yang berpotensi jadi korban kekerasan fisik dan juga psikis dari oknum majikan yang tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, sebanyak 2.641 PRT melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan selama periode 2018-2024. Ada juga yang mengalami penundaan pembayaran upah hingga pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.

Staf Advokasi Jala PRT Jumi Sih mengungkap, terbataskannya kebebasan berserikat merupakan

permasalahan struktural yang dihadapi oleh kelompok pekerja ini dan membuat mereka merasa terisolasi dan tidak berdaya.

Dengan disahkannya RUU PRT, akan ada payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar PRT dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan bermartabat.

Jumi Sih mengatakan, salah satu tantangan utama dalam implementasi RUU PRT adalah kurangnya kesadaran di kalangan pemberi kerja tentang perlunya perlindungan terhadap PRT. Sebab, banyak pemberi kerja yang masih menganggap PRT sebagai kelas yang lebih rendah dibandingkan warga negara lainnya.

Edukasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap PRT harus ditingkatkan secara masif.

"Peran negara sangat krusial dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pihak, baik PRT maupun pemberi kerja, tentang hak dan kewajiban masing-masing sesuai undang-undang," tandasnya.

Di media sosial X, netizen menilai, sudah waktunya PRT dilindungi lewat undang-undang. Sebab, banyak PRT yang digaji ala kadarnya, direndahkan, hingga ada yang tidak diberi waktu istirahat dan hari libur.

Akun @WandaRoxanne me-

"PRT berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan agar semua orang yang berada dalam ekosistem kerja itu bisa merasa aman dan nyaman."

ngatakan, masih banyak orang menilai PRT bukanlah pekerjaan resmi atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian. PRT dianggap hanya kerja sampingan.

"Kurang kerja keras apa ini PRT yang sebagian kerja 16 jam per hari. Mau kerja 24 jam tanpa tidur pun, belum tentu gaji UMR. Ada PRT mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi," tulisnya.

Akun @Ranyusaff01 mengungkap, jam kerja PRT ada yang sangat panjang, namun tetap di gaji sangat rendah.

"Ada PRT yang kerjanya mulai pukul 5.30 sampai 22.30. Gajinya sebulan gak sampai Rp 1 juta, udah gitu gak boleh main handphone. Normal kerja 8 jam sehari. Ini sudah keterlalu beratnya," katanya.

Senada, akun @Marto233 mengaku heran dengan kalangan menengah atas yang seperti memperlakukan PRT kayak mesin.

"Ada tuh yang punya pembantu rumah tangga kerja 16 jam per hari selama seminggu penuh, mana gak ada liburanya. Salah sedikit dimarahin, Gaji di bawah 3 juta, kerja puluhan tahun pun gak ada uang pensiun. Yang kayak gini mau dibiarin?," katanya.

Akun @berheng043 menyimpulkan, dengan adanya regulasi yang melindungi, maka PRT akan bebas dari eksploitasi. ■OSP